

Optimalisasi Peran Sub Bagian Protokoler dalam Mendukung Efektivitas Tugas Pimpinan Daerah: Studi pada SETDA Provinsi Papua Tengah

Junior Rahasano Panjaitan^{1*}, Manuel August Todingbua², Amir Jaya³

^{1,2,3}Program Magister Manajemen, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia

E-mail:

juniorpanjaitan77@gmail.com^{1*}

*Penulis korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengoptimalkan peran Sub Bagian Protokoler dalam mendukung efektivitas tugas Pimpinan Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sub Bagian Protokoler memiliki peran strategis dalam mengatur agenda pimpinan, penyusunan acara resmi, penyambutan tamu, dan menjaga citra kelembagaan pemerintah daerah. Namun demikian, ditemukan sejumlah kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan teknis, kurang memadainya sarana-prasarana, serta koordinasi internal dan eksternal yang belum optimal. Strategi optimalisasi diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP), pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan agenda, serta penguatan koordinasi lintas unit kerja. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan fungsi Sub Bagian Protokoler merupakan faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas tugas pimpinan daerah, baik dalam aspek kelancaran agenda, produktivitas, maupun citra pemerintah daerah di mata publik.

Kata kunci: Protokoler, Pimpinan Daerah, Efektivitas, Optimalisasi, Papua Tengah

Abstract

This study aims to analyze and optimize the role of the Protocol Subdivision in supporting the effectiveness of regional leaders' duties at the Regional Secretariat of Central Papua Province. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The findings reveal that the Protocol Subdivision plays a strategic role in managing official agendas, organizing ceremonial events, facilitating guest receptions, and safeguarding the institutional image of local government. Nevertheless, several challenges remain, including limited human resources, insufficient technical training, inadequate facilities, and suboptimal coordination both internally and externally. Optimization strategies include strengthening human resource capacity through continuous training, improving and operationalizing standard operating procedures (SOPs), utilizing information technology for agenda management, and enhancing inter-unit coordination. The study concludes that reinforcing the strategic role of the Protocol Subdivision is essential to improving the effectiveness of regional leaders' duties in terms of agenda implementation, productivity, and public perception of government performance.

Keywords: Protocol, Regional Leadership, Effectiveness, Optimization, Central Papua

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Organisasi Sub Bagian Protokoler dalam struktur Pemerintahan Daerah memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah, antara lain pengaturan agenda resmi, penyelenggaraan acara kenegaraan, penerimaan tamu penting, dan pencitraan kelembagaan pemerintah daerah. Penelitian di Kabupaten Simeulue menyatakan bahwa pelaksanaan protokol menambah warna dan memperkuat citra keberhasilan penyelenggaraan acara resmi, sekaligus memengaruhi citra pemerintahan daerah secara keseluruhan (Selfia & Fadhlain, 2022).

Meskipun demikian, dalam banyak pemerintah daerah, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan tenaga protokoler yang terlatih dan minimnya sarana-prasarana pendukung yang memadai. Ini dapat mengganggu efektivitas operasional protokoler dan berdampak negatif terhadap produktivitas tugas pimpinan. Terlebih dalam era desentralisasi yang semakin berkembang di Indonesia, kinerja aparatur pemerintah daerah menjadi semakin penting sebagai wujud penerapan penataan birokrasi yang profesional dan akuntabel (Hoesein et al., 2022).

Data atau Fakta Pendukung

Berikut adalah penyajian data ilustratif yang menggambarkan urgensi penguatan fungsi protokol di pemerintahan daerah:

Tabel 1. Data/Fakta Pendukung Penelitian

Aspek	Fakta / Data Ilustratif
Akses terhadap sanitasi	±20% rumah tangga di Indonesia belum memiliki akses ke sanitasi yang layak (2021) (MDPI)
Kapasitas Aparatur	Banyak daerah kekurangan aparatur terlatih, termasuk tenaga protokoler
Desentralisasi daerah	Pemerintah daerah semakin diberi tanggung jawab dalam pengelolaan urusan lokal (MDPI , ResearchGate)

Catatan: Data di atas bersifat ilustratif, namun mencerminkan gambaran tantangan umum dalam birokrasi pemerintah daerah dan urgensi untuk memperkuat fungsi protokoler sebagai bagian dari profesionalitas pemerintahan.

Urgensi Penelitian

Penguatan fungsi Sub Bagian Protokoler menjadi sangat penting karena, selain mendukung kelancaran pelaksanaan agenda resmi pemerintah daerah, fungsi ini juga berperan dalam meningkatkan citra kelembagaan, efektivitas komunikasi formal, dan kepercayaan publik

terhadap pemerintahan lokal (Selfia & Fadhlain, 2022) [Jurnal Indonesia Sosial Teknologi](#). Dengan keterbatasan SDM, sarana, dan SOP yang belum optimal, efektivitas peran protokol berpotensi terganggu, yang pada akhirnya bisa memengaruhi kinerja pimpinan dan pelayanan publik. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk merumuskan strategi optimalisasi yang berbasis pada bukti empiris dan praktik implementasi di lapangan.

Rumusan Masalah

Berikut adalah rumusan masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini:

1. Bagaimana peran Sub Bagian Protokoler dalam mendukung efektivitas tugas pimpinan daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah?
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas protokoler?
3. Strategi apa yang dapat diusulkan untuk mengoptimalkan fungsi Sub Bagian Protokoler dalam rangka mendukung efektivitas tugas pimpinan daerah?

TINJAUAN LITERATUR

Protokoler dalam Pemerintahan Daerah

Protokoler merupakan perangkat tata aturan dalam penyelenggaraan acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Kementerian Dalam Negeri RI, 2010). Dalam konteks pemerintahan daerah, fungsi protokoler berperan penting sebagai pengatur kelancaran agenda pimpinan, pengelolaan komunikasi formal, dan representasi citra kelembagaan. Penelitian mutakhir menegaskan bahwa protokol tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis dalam menjaga legitimasi dan profesionalisme pemerintahan (Selfia & Fadhlain, 2022). Selain itu, media digital mulai dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan keprotokolan, misalnya melalui monitoring media sosial guna memperkuat transparansi dan kedekatan pemerintah dengan publik (Zaenal Arifin, 2023).

Efektivitas Tugas Pimpinan Daerah

Efektivitas tugas pimpinan daerah diukur melalui indikator seperti ketepatan waktu pelaksanaan agenda, kualitas koordinasi, kepuasan stakeholder, serta pencitraan lembaga (Gibson et al., 2012). Studi terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan

tugas pimpinan daerah sangat dipengaruhi oleh dukungan struktural, termasuk peran strategis unit protokoler (Daulay, 2022). Efektivitas birokrasi lokal menjadi semakin relevan dalam era desentralisasi, di mana pimpinan daerah dituntut untuk mampu menjalankan fungsi koordinasi pembangunan sekaligus pelayanan publik secara adaptif dan profesional (Hoesein et al., 2022).

Optimalisasi dalam Konteks Organisasi Publik

Optimalisasi organisasi publik merujuk pada upaya peningkatan kinerja dan efisiensi agar tujuan organisasi tercapai secara maksimal. Menurut Hasibuan (2017), optimalisasi dicapai melalui penguatan SDM, pembaruan SOP, serta pemanfaatan teknologi. Studi empiris menekankan pentingnya kepemimpinan transformasional, budaya organisasi adaptif, serta dukungan sistem digital untuk meningkatkan kinerja birokrasi (Cummings & Worley, 2014; Lupitasari et al., 2023). Dalam konteks pemerintahan daerah, optimalisasi fungsi Sub Bagian Protokoler menjadi kunci untuk menjawab tantangan koordinasi lintas sektor, keterbatasan SDM, serta dinamika perubahan agenda pimpinan (Laba et al., 2025).

Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian memberikan gambaran empiris terkait peran dan tantangan protokoler di pemerintahan daerah. Laba et al. (2025) menemukan bahwa keberhasilan agenda pimpinan sangat ditentukan oleh koordinasi dan kesiapan protokol, meskipun sering terkendala keterbatasan SOP. Daulay (2022) menunjukkan bahwa kinerja protokol mendukung legitimasi pimpinan daerah, tetapi masih menghadapi hambatan berupa minimnya pelatihan. Sementara itu, Lupitasari et al. (2023) menekankan pentingnya regulasi yang lebih kuat di tingkat daerah agar tugas protokol lebih terstruktur. Penelitian terbaru juga menggarisbawahi potensi digitalisasi sebagai instrumen optimalisasi protokoler dalam era birokrasi modern (Zaenal Arifin, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali fenomena sosial secara mendalam, khususnya dalam memahami peran, tantangan, serta strategi optimalisasi Sub Bagian Protokoler dalam

mendukung efektivitas tugas pimpinan daerah (Creswell & Poth, 2018). Studi kasus dipandang tepat karena penelitian berfokus pada satu unit analisis, yaitu Sub Bagian Protokoler Sekretariat Daerah (SETDA) Provinsi Papua Tengah, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai konteks yang diteliti (Yin, 2018).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan fungsi protokoler di lingkungan SETDA Provinsi Papua Tengah. Namun, mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya, penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan relevansi dan penguasaan mereka terhadap masalah yang diteliti (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016). Informan kunci terdiri atas pejabat struktural, kepala Sub Bagian Protokoler, staf pelaksana, serta pihak eksternal yang sering berkoordinasi dengan unit protokoler. Teknik ini memungkinkan diperolehnya data yang kaya dan sesuai kebutuhan penelitian.

Lokasi penelitian adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah, dengan fokus utama pada Sub Bagian Protokoler. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada urgensi penelitian terkait tantangan keprotokolan di daerah otonomi baru yang menghadapi dinamika sosial, geografis, dan birokrasi yang unik. Penelitian dilaksanakan selama satu bulan pada tahun 2025, bertepatan dengan periode pelaksanaan sejumlah agenda resmi pimpinan daerah. Hal ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk melakukan observasi langsung terhadap proses kerja protokoler dalam mendukung aktivitas pimpinan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan kunci yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi protokoler. Observasi dilakukan dengan mengikuti beberapa kegiatan resmi pimpinan daerah, sementara dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan, standar operasional prosedur (SOP), serta laporan internal. Teknik triangulasi digunakan untuk memastikan validitas data dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber (Flick, 2018).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Reduksi data

dilakukan dengan memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik, sementara kesimpulan ditarik berdasarkan pola dan hubungan antar-temuan. Proses analisis dilakukan secara simultan sejak tahap awal pengumpulan data, sehingga hasil penelitian dapat lebih akurat dan reflektif terhadap fenomena lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Penelitian ini melibatkan empat informan kunci yang memiliki peran strategis maupun teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas Sub Bagian Protokoler di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Informan pertama, Herman Kayame, S.T., M.T., adalah Staf Ahli II yang berfokus pada bidang ekonomi dan pembangunan, memberikan perspektif makro mengenai koordinasi lintas sektor. Informan kedua, Ukkas, S.Sos., M.KP, adalah Staf Ahli III yang menyoroti dimensi kemasyarakatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Informan ketiga, Tumiran, S.Sos., M.AP, menjabat sebagai Asisten II bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dengan tanggung jawab koordinatif dalam agenda pembangunan. Informan keempat, Alanthino Wiay, S.STP., M.Si., adalah Kepala Bagian Administrasi Pimpinan yang secara langsung membawahi Sub Bagian Protokoler dan menjadi pengambil keputusan operasional terkait kegiatan protokoler.

Temuan Utama

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Sub Bagian Protokoler memiliki peran vital dalam memastikan kelancaran agenda pimpinan daerah, termasuk penyusunan jadwal, penyambutan tamu, serta pengaturan acara resmi. Namun, sejumlah kendala masih muncul. Pertama, keterbatasan SDM menjadi isu dominan; jumlah personel belum sebanding dengan beban kerja, dan pelatihan teknis protokoler masih jarang dilakukan. Kedua, koordinasi internal dan eksternal belum berjalan optimal. Herman Kayame menegaskan bahwa komunikasi antarunit sering terkendala keterlambatan informasi, sedangkan Ukkas menyoroti kurangnya pemahaman instansi eksternal mengenai urgensi protokol. Ketiga, sarana-prasarana seperti transportasi dinas, perlengkapan dokumentasi, dan sistem informasi masih

terbatas, sebagaimana disampaikan Tumiran dan Alanthino.

Di sisi lain, sudah ada beberapa strategi inovasi awal yang mulai dilakukan, misalnya penggunaan kalender digital dan aplikasi komunikasi internal untuk penjadwalan kegiatan. Alanthino menambahkan bahwa sistem digitalisasi agenda pimpinan menjadi salah satu prioritas pengembangan, meskipun implementasinya masih bersifat parsial.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menjawab rumusan masalah yang diajukan:

1. Peran Sub Bagian Protokoler terbukti krusial dalam mendukung efektivitas tugas pimpinan daerah.
2. Kendala utama meliputi keterbatasan SDM, koordinasi yang belum optimal, dan sarana-prasarana yang kurang memadai.
3. Strategi optimalisasi meliputi peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, digitalisasi sistem kerja, penyusunan SOP yang lebih operasional, serta penguatan dukungan kelembagaan.

Pembahasan

Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa keberhasilan pimpinan daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sangat bergantung pada dukungan unit protokoler. Keterbatasan SDM yang teridentifikasi selaras dengan penelitian Daulay (2022) yang menemukan bahwa minimnya pelatihan aparatur protokoler berdampak pada kualitas pelayanan agenda resmi. Demikian pula, masalah koordinasi lintas sektor pernah diidentifikasi oleh Laba et al. (2025), yang menunjukkan bahwa ketidakharmonisan komunikasi menyebabkan tumpang tindih agenda pimpinan.

Faktor sarana-prasarana yang tidak memadai memperlihatkan kesamaan dengan penelitian Lupitasari et al. (2023), yang menekankan pentingnya regulasi teknis serta penyediaan fasilitas sebagai prasyarat keberhasilan keprotokolan. Di sisi lain, inovasi berupa pemanfaatan teknologi digital menjadi temuan baru (novelty) yang membedakan penelitian ini dari studi sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih menekankan aspek normatif dan regulatif, hasil penelitian ini menyoroti potensi digitalisasi agenda protokoler sebagai instrumen strategis untuk efisiensi dan akuntabilitas, sejalan dengan tren birokrasi modern (Zaenal Arifin, 2023).

Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa rekomendasi untuk memperkuat kinerja Sub Bagian Protokoler melalui pelatihan teknis berkelanjutan, pengadaan sarana penunjang, serta pembentukan sistem informasi keprotokolan berbasis digital. Implementasi langkah-langkah tersebut diyakini dapat meningkatkan efektivitas tugas pimpinan daerah, baik dalam hal kelancaran agenda maupun pencitraan kelembagaan pemerintah daerah.

Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang peran protokoler dalam konteks manajemen publik. Jika sebagian besar literatur sebelumnya menekankan fungsi keprotokolan sebagai pelengkap administrasi formal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa protokol merupakan aktor strategis dalam efektivitas kepemimpinan daerah. Hal ini menguatkan perspektif teori manajemen kinerja (Gibson et al., 2012) dan teori pengembangan organisasi (Cummings & Worley, 2014), sekaligus menambahkan dimensi baru mengenai pentingnya inovasi digital dalam tata kelola protokoler.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sub Bagian Protokoler dalam mendukung efektivitas tugas pimpinan daerah, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi di Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah. Hasil penelitian menegaskan bahwa Sub Bagian Protokoler memiliki posisi strategis dalam memastikan kelancaran agenda resmi, penyambutan tamu, pengelolaan komunikasi formal, serta pencitraan kelembagaan pemerintah daerah.

Namun, efektivitas pelaksanaan tugas tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, terutama keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan teknis, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta keterbatasan sarana-prasarana. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah untuk memperkuat fungsi protokoler agar dapat mendukung produktivitas dan legitimasi kepemimpinan daerah secara optimal.

Strategi yang dapat ditempuh meliputi penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih komprehensif, pemanfaatan teknologi digital untuk pengelolaan

agenda dan dokumentasi, serta penguatan koordinasi lintas unit kerja. Inovasi digital menjadi salah satu temuan penting penelitian ini, karena mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penyelenggaraan fungsi protokoler.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Sub Bagian Protokoler sebagai instrumen strategis dalam mendukung tugas pimpinan. Secara teoretis, penelitian ini memperluas literatur mengenai manajemen keprotokolan dengan menekankan pentingnya integrasi teknologi digital, sekaligus mengonfirmasi relevansi teori manajemen kinerja dan pengembangan organisasi dalam konteks birokrasi lokal.

Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga temuan belum dapat digeneralisasi ke semua pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berfokus pada konteks daerah otonomi baru sehingga kondisi sosial, budaya, dan politik lokal turut memengaruhi hasil. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed-method dengan cakupan yang lebih luas, serta membandingkan praktik protokoler antar daerah. Studi lanjutan juga dapat mengeksplorasi efektivitas penerapan teknologi digital dalam keprotokolan secara lebih mendalam, guna memperkaya pemahaman mengenai modernisasi birokrasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications
- Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2014). *Organization development and change* (10th ed.). Cengage Learning
- Daulay, L. T. (2022). *Peran protokoler dalam menunjang keberhasilan kinerja kepala daerah Kabupaten Padang Lawas Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–

4.
<https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE Publications
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2012). *Organizations: Behavior, structure, processes* (14th ed.). McGraw-Hill Education
- Hoesein, Z. A., Nurmandi, A., & Mutiarin, D. (2022). The effectiveness of decentralization policy in local government administration. *Jurnal Akta Yudisia*, 7(2), 245–257
- Laba, M. O. B., Mustafa, I., Sedu, V. A., & Kedoh, L. N. (2025). Peran Sub Bagian Protokol dalam penyusunan agenda kerja pimpinan pada Bagian Prokompim Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(1), 45–57
- Lupitasari, N., Setianingsih, E. L., Putranti, I. R., & Afrizal, T. (2023). Urgensi pengaturan kebijakan protokoler kepala daerah dalam rangka mewujudkan efektivitas tugas-tugas protokoler kepala daerah Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. *Perspektif*, 12(2), 691–697
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications
- Selfia, N., & Fadhlain, F. (2022). Analisis peran protokol dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Terapan*, 8(1), 101–113
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications
- Zaenal Arifin, D. (2023). *Pemanfaatan media monitoring Instagram Sekretariat Daerah Kota Bandung dalam rangka optimalisasi tugas protokol dan komunikasi pimpinan (Prokompim)* (Doctoral dissertation, Universitas Sangga Buana YPKP)